

# **MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT PEDESAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAUL SHAFFER**

Ahmad Zuber<sup>1</sup> dan Bagus Haryono<sup>2</sup>

- 1) Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- 2) Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

## **ABSTRAK**

Kemiskinan dipandang sebagai keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kekurangan. Secara konseptual, kemiskinan dapat dijelaskan melalui konsep-konsep seperti kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan natural. Tujuan dan target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa model penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dan Paul Shaffer di Desa Baran dan Desa Sanggang Kabupaten Sukoharjo.

Rancangan penelitian dilakukan dengan pendekatan paradigma kualitatif dengan jenis studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengamatan, wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan angket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tahapan pembangunan masyarakat pedesaan Baran dan Sanggang dilakukan secara partisipatif. Tahapan perencanaan masih seringkali melibatkan masyarakat miskin melalui rembug desa. Tahapan pelaksanaan pembangunan biasanya dilakukan oleh *developer*. Sedangkan tahapan evaluasi pembangunan biasanya dilakukan oleh pihak khusus yang melakukan inspeksi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Pendekatan Paul Shaffer dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat pedesaan secara umum masih relevan. Namun khusus mengenai modal politik yang berupa keikutsertaan dalam organisasi politik dipandang tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Kemudian modal paksaan juga dipandang tidak signifikan di dalam usaha untuk keluar dari permasalahan kemiskinan.

**Keywords:** Kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, partisipasi masyarakat, pendekatan Paul Shaffer

## **ABSTRACT**

Ahmad Zuber dan Bagus Haryono

Sociology Department, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret  
University;

Sociology Department, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret  
University

Poverty is seen as condition of deprivation that is experienced by someone or a group of people. The poverty can be analysed through cultural poverty, structural poverty, and natural poverty. The purpose and the target of this research are to describe and to analyse the model of rural poverty alleviation based on society participation and Paul Shaffer in Baran and Sanggang villages of Sukoharjo.

The research design is done with qualitative paradigm with case study. The data were gained through observation, deep interview, focus group discussion, and questionnaire.

The research result shows that not all of the development stages in Baran and in Sanggang are done by society participation. In the plan stage, government often involves rural poor community through village discussion. The stage of development implementation is usually done by developer. Meanwhile the stage of development evaluation is usually done by specific persons who do the inspection and evaluation to the development implementation.

The approach of Paul Shaffer to alleviate rural poverty is generally still relevant. Political capital that consist of poor people participation in political organization is seen irrelevant with the thought of poor people in alleviating rural poverty. The coercion capital is also seen insignificant in the effort of solving the poverty.

Key words: poverty, poverty alleviation, society participation, Paul Shaffer approach.

## **Pendahuluan**

Sampai sekarang ini masalah kemiskinan masih merupakan masalah yang penting untuk dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya. Masalah kemiskinan tidak hanya melanda di masyarakat Asia, seperti Indonesia, tetapi masalah kemiskinan juga melanda seluruh masyarakat dunia, termasuk Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adi kuasa (super power). Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia dari tahun 1976 hingga tahun 1993 ada kecenderungan menurun. Kemudian dari tahun 1996 hingga 2002 jumlah penduduk miskin cenderung naik. Kemudian dari tahun 2003 hingga 2007 jumlah penduduk miskin cenderung turun lagi (Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2001 dan 2007, Berita Resmi Statistik, <http://www.bps.go.id>, December 25, 2010).

Secara umum realitas kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Berdasarkan data yang ada di tahun 2006, jumlah penduduk miskin Sukoharjo sebanyak 239.882 jiwa (28,93%) dari jumlah total penduduk 829.054 jiwa. Kemudian pada tahun 2007 angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo meningkat menjadi 260.356 jiwa ( 30,98%) dari jumlah penduduk 840.477 jiwa. Kemudian ketika di tahun 2008 dibuka kesempatan untuk mengisi kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), jumlah KK miskin meningkat dari 80.170 KK miskin pada tahun 2007, menjadi 97.333 KK (Solopos, Senin, 14 Juli 2008 : 1 dan 8).

Dengan melihat kondisi tersebut di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai "Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Sukoharjo dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat dan Paul Shaffer."

Tema penelitian ini berkaitan dengan salah satu tema-tema strategis yang menjadi topik unggulan perguruan tinggi dari Kementrian Riset dan Teknologi yaitu tentang pengentasan kemiskinan. Tema penelitian ini juga berkaitan dengan road map penelitian di bidang pengentasan kemiskinan UNS Tahun 2011-2025 yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, terutama berkaitan dengan kajian sikap dan perilaku ekonomi masyarakat miskin terutama masyarakat

miskin pedesaan (*Sumber: Rencana Induk Penelitian Unggulan UNS Tahun 2012-2025, p.49-50*).

## **Kajian Teoritik**

### Posisi Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi

Kemiskinan sebagai sebuah konsep penting merupakan bagian kajian dari stratifikasi sosial. Dalam stratifikasi sosial perbedaan kelas menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Di dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai adanya kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.

Ada perbedaan cara pandang yang mendasar antara perspektif teori fungsional dan teori konflik dalam melihat realitas sosial stratifikasi sosial ini. Namun baik pendekatan fungsionalis maupun konflik, keduanya sependapat bahwa masyarakat itu terstratifikasi kedalam kelas sosial. Kelas sosial, menurut Horton dan Hunt (1984: 344), didefinisikan sebagai suatu strata yang terdiri dari orang yang mempunyai posisi yang sama dalam suatu rangkaian kesatuan status sosial. Horton dan Hunt menyebutkan bahwa Aristotle dua ribu tahun yang lalu mengamati masyarakat cenderung terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok sangat kaya, sangat miskin, dan diantara keduanya. Untuk Karl Marx, kelas sosial pada prinsipnya terdiri dari dua kelas, yaitu pekerja upahan (*proletariat*) dan kapitalis (*bourgeoisie*). Adam Smith membagi masyarakat kedalam tiga kelompok, yaitu mereka yang hidup dari sewa tanah, upah kerja, dan keuntungan perdagangan. Kemudian Thorstein Veblen membagi masyarakat kedalam dua kelas, pertama yaitu kelas pekerja, yang berjuang untuk hidup, kedua yaitu kelas orang yang bersenang-senang, yang menunjukkan betapa mereka kaya raya (lihat Horton dan Hunt, 1984: 344).

### Apakah Kemiskinan Itu?

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih bagi kita yang bermukim di Indonesia terutama di daerah pedesaan, banyak tetangga kita yang masih hidup dalam keadaan miskin. Mereka hidup dengan cara serba kekurangan. Mereka harus mengekang apa yang menjadi keinginan mereka sebab keterbatasan yang mereka miliki. Seringkali anak-anak, istri atau suami mereka harus rela menahan keinginan untuk

membeli beras, lauk pauk, susu, sayur-sayuran, buah-buahan dan lainnya. Bahkan seringkali keluarga mereka tidak mampu membayangkan bagaimana orang kaya bisa membeli rumah, pekarangan atau mobil dengan harga ratusan juta. Sungguh kemampuan-kemampuan seperti itu hanya dipandang sebagai mitos bagi keluarga miskin. Sesuatu yang teramat sangat sulit untuk bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Kemiskinan merupakan fenomena umum artinya fenomena itu terdapat di berbagai belahan masyarakat di dunia, termasuk Indonesia (lihat Arraiyah, 2007: 1). Fenomena kemiskinan terjadi di seluruh belahan benua baik Eropa, Amerika, Asia, maupun Afrika. Fenomena kemiskinan menjangkiti semua orang baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak remaja muda ataupun tua, tidak pandang bulu, ras, maupun agama.

Karena semua masyarakat bangsa mengalami fenomena kemiskinan maka tidaklah mudah untuk dapat memberikan suatu definisi kemiskinan yang bisa diterima semua orang. Brébant dalam bukunya "La Pauvreté: Un Destin?" mengemukakan bahwa tidak ada sebuah model definisi kemiskinan secara mutlak bisa diterima oleh semua orang. Tetapi bentuk-bentuk definisi tentang kemiskinan senantiasa beragam sesuai dengan sejarah masing-masing masyarakat yang bersangkutan (Brébant, 1984: 15). Pemikiran seperti ini diperkuat oleh Quibria (1993: 7). Ia berpendapat bahwa, "*In any case, from Adam Smith on, they have argued that there are no universal poverty norms but only ones that are space, time and society specific.*"

Berkaitan dengan pemikiran Brébant dan Quibria tersebut maka setiap masyarakat bangsa mempunyai definisi sendiri berkaitan dengan kemiskinan. Masyarakat Indonesia mempunyai definisi yang berbeda dari masyarakat Prancis, Inggris, Jerman ataupun Amerika. Begitu juga para Sosiolog akan mempunyai definisi yang berbeda tentang kemiskinan jika dibandingkan para ekonom, ahli kesehatan, ahli hukum ataupun ahli teknik. Bahkan sekalipun seorang ahli telah menyetujui ukuran minimum dari suatu makanan, pakaian, dan perumahan untuk kelangsungan hidup manusia, dan ini dinyatakan sebagai seperangkat norma universal. Namun seperangkat norma universal ini juga menemukan kesulitan dalam kejelasan pendefinisian dan pengukuran (Quibria, 1993: 7).

Tlemçani dan Missamou dalam sebuah buku "*Pauvreté et Marché du Travail: le Cas du Maroc*" mengemukakan:

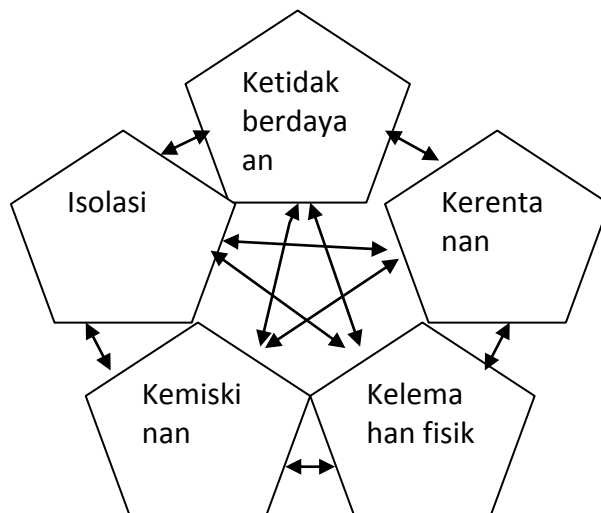
“Auparavant, l'idée de pauvreté s'assimilait essentiellement à une carence matérielle. Autrement dit, la notion la plus courante de la pauvreté renvoie souvent à une insuffisance du niveau de vie. Aujourd'hui, d'autres dimensions sont prises en compte, liées à l'éducation, à la participation, à l'intégration et à l'épanouissement des êtres humains (dalam Centre Tricontinental, 2000: 128)”

Dengan kata lain, menurut Tlemçani dan Missamou, pada awalnya ide tentang kemiskinan secara mendasar berkaitan dengan kekurangan materi. Pemikiran kemiskinan selalu merujuk pada ketidakcukupan hidup. Sekarang ini dimensi-dimensi lain tentang ide kemiskinan telah berkembang, dikaitkan dengan dimensi pendidikan, partisipasi, integrasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keberadaan manusia.

Pendapat tentang kemiskinan merupakan masalah kekurangan materi diperkuat oleh Sen dan Foster. Menurut mereka kemiskinan adalah masalah deprivasi atau problematika kekurangan. Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau keluarga serba kekurangan (Sen dan Foster, 1997). Kekurangan dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan pangan, sandang, perumahan, dan air bersih, tetapi kekurangan juga berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat diraba (*intangibile*), seperti kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mendapat pekerjaan, dan juga rasa hormat dari orang lain (lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/poverty>).

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sangat lama. Ratusan ataupun ribuan tahun yang lalu sudah ada fenomena kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena individual ataupun sosial yang pada umumnya tidak dikehendaki. Individu, kelompok, masyarakat ataupun negara bangsa cenderung melawan dan memerangi keberadaan kemiskinan. Namun seperti kita saksikan hingga kini, kita belum bisa melepaskan diri dari masalah kemiskinan. Supardi Suparlan (dalam Arraiyyah, 2007: 1), Sosiolog Indonesia, mengemukakan bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri, terlepas dari aspek-aspek lainnya. Tetapi kemiskinan merupakan hasil interaksi berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain ada banyak faktor yang dapat mengakibatkan

seseorang, suatu keluarga, suatu masyarakat atau suatu negara dapat menjadi miskin, dan kemudian mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan yang mereka alami. Chambers (1987) dalam bukunya "Pembangunan Desa" menyebut dengan istilah perangkap kemiskinan. Dengan istilah perangkap kemiskinan, Chambers ingin menjelaskan bahwa rumah tangga miskin dan lingkungannya terdapat unsur-unsur yang terjalin erat dalam suatu mata rantai. Mata rantai ini disebut sebagai sebuah lingkaran setan yang membuat rumah tangga miskin selalu terperangkap dalam kemiskinan (Chambers, Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang, 1987: 145-148). Perangkap kemiskinan Chambers, 1987, tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Perangkap Kemiskinan Chambers (1987: 145)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, Chambers ingin menjelaskan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara kemiskinan, kelemahan fisik, kerentanan, isolasi dan ketidakberdayaan. Menurut Chamber, kemiskinan merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Kemiskinan mengakibatkan kelemahan fisik, karena kurang makan. Kekurangan gizi menjadikan daya tahan tubuh terhadap infeksi/ penyakit rendah. Orang menjadi rentan terhadap keadaan darurat atau kebutuhan mendesak karena tidak mempunyai kekayaan. Kemudian orang juga menjadi tidak berdaya karena kehilangan kesejahteraan dan kedudukan yang rendah. Orang miskin tidak mempunyai suara. Kemudian orang miskin menjadi tersisih baik secara fisik

maupun sosial. Kelima faktor ini saling kait mengkait, saling melilit membentuk sebuah mata rantai. Mata rantai ini disebut sebagai sebuah lingkaran setan yang membuat rumah tangga miskin semakin terperangkap dalam kemiskinan.

Menurut Arraiyah yang mendasarkan pemikiran Anwar Nasution, keterbelakangan ekonomi suatu negara atau masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, sikap hidup, dan adat istiadat, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Pernyataan ini mengakui bahwa kemiskinan itu bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor (Arraiyah, 2007: 2).

#### Model Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Model penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan partisipasi masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat merupakan faktor yang sangat penting untuk dilibatkan langsung dalam program penanggulangan kemiskinan. Karena masyarakat miskin dipandang sebagai subjek yang sangat tahu terhadap apa-apa yang dibutuhkan untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi.

Model penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat, menurut Oakley dan Marsden (1984: 13-15) dalam arti bahwa penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan segenap komponen masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut dibutuhkan tidak hanya dalam pelaksanaan program namun sejak diagnosis masalah, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi program. Model penanggulangan kemiskinan ini memberikan titik perhatian terhadap suara masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan yang mereka hadapi. Dalam arti model pendekatan ini memperhatikan kebutuhan, keinginan, harapan, cita-cita, maupun kendala yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

Partisipasi masyarakat dapat sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun sebagai salah satu sasaran pembangunan itu sendiri.

Pelibatan perguruan tinggi, organisasi-organisasi kemasyarakatan (RT, RW, PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat formal maupun informal dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan sangat berarti



dan memegang kunci keberhasilan baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program.

#### Model Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Paul Shaffer

Model penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan Paul Shaffer (2008) meliputi tujuh pendekatan bentuk modal, yaitu:

1. Pendekatan Modal Manusia (*Human Capital*): Peningkatan pendidikan hingga tamat SMU, Kesehatan, dan gizi makanan
2. Pendekatan Modal Sosial (*Social Capital*): organisasi sosial, pertemanan, jaringan kerja, kepercayaan, dan resiprositi
3. Pendekatan Modal Ekonomi (*Economic Capital*) : tanah, tenaga kerja, dan modal
4. Pendekatan Modal Politik (*Political Capital*): jaringan dengan organisasi politik formal dan informal, dan keanggotaan dalam organisasi politik formal dan informal.
5. Pendekatan Modal Budaya (*Cultural Capital*): norma sosial, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
6. Pendekatan Modal Paksaan (*Coercive Capital*): sumber-sumber kekerasan, intimidasi, dan kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkuat norma sosial dan memelihara hubungan sosial.
7. Pendekatan Modal Alam (*Natural Capital*): jumlah dan kualitas ketersediaan sumber daya alam, dan pengetahuan atau keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam (Paul Shaffer, 2008: 200).

Model pendekatan Paul Shaffer (2008) ini yang akan digunakan untuk memotret dan menganalisis sejauh mana daerah yang direncanakan sebagai lokasi penelitian telah menerapkan komponen-komponen yang ada. Kekuatan dan kelemahan yang ada berdasarkan komponen-komponen yang dikemukakan oleh Paul Shaffer (2008) akan sangat berhubungan dengan tingkat keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah yang bersangkutan.

## Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan paradigma kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, dan Desa Baran, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, dan Desa Baran, Kecamatan Nguter ini dipilih karena menurut data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo tahun 2007 menyebutkan bahwa dua desa ini merupakan desa yang mendapatkan persentasi tertinggi angka kemiskinan (Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470.05/590/2007, tanggal 29 Desember 2007).

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Pada awalnya jumlah informan yang akan diobservasi terkait penelitian ini tidak ditentukan secara pasti. Jumlahnya tergantung pada variasi informasi yang diperoleh. Hasil akhir penelitian tercatat ada sebanyak 29 informan yang memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, wawancara mendalam (*In-depth Interview*), observasi partisipatif (*Participant Observation*), studi pustaka (*Desk Study*), perekaman (*Recording*), dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang mencakup empat tahap analisis data, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data (*data reduction*), (3) penyajian data (*data display*), dan (4) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Kemudian hasil dari analisis data tersebut dianalisa kembali dengan menggunakan pendekatan teori model penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan berbasis partisipasi masyarakat dan Paul Shaffer.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Makna Kemiskinan masyarakat Pedesaan**

Dari pernyataan beberapa informan dapat dikemukakan bahwa kemiskinan pada umumnya mengacu pada status pekerjaan yang tidak tetap, dan kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan.

Kemiskinan juga mengacu kepada keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tingkat pendidikannya kurang, tingkat kesehatannya tidak baik, dan tingkat pengetahuan dan pengalamannya kurang.

### **Kriteria Kemiskinan BPPS**

Berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) kriteria kemiskinan yang digunakan untuk menentukan keluarga miskin untuk daerah Kabupaten Sukoharjo menggunakan kriteria dari BPS (Badan Pusat Statistik). Hal ini dikemukakan oleh WYD seorang peserta dari BAPPEDA Sukoharjo. Menurut WYD BAPPEDA Sukoharjo tidak ikut mencampuri di dalam penentuan jumlah angka kemiskinan untuk masing-masing desa yang ada di daerah Kabupaten Sukoharjo. Jumlah keluarga miskin yang sekarang ini murni menggunakan tolok ukur yang diberikan oleh BPS. Sedangkan BPS di dalam menentukan jumlah angka kemiskinan rumah tangga/ keluarga di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Sukoharjo tidak diinterfensi oleh lembaga manapun (FGD, 11 Agustus 2012).

Adapun menurut BPS kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Sukoharjo, dan sekaligus untuk seluruh wilayah Indonesia mencakup 14 kriteria. Kriteria tersebut meliputi:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu keluarga/ rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (FGD, 11 Agustus 2012; <http://www.dinsos.pemda-diy.go.id/index.php>, diakses 15 Agustus 2012).

Menurut SW Kepala Desa Sanggang menyarankan agar BAPEDA Sukoharjo perlu mengajak rembug seluruh Kepala Desa yang ada di Sukoharjo untuk memutuskan jumlah penerima raskin. Supaya masing-masing Kepala Desa mengetahui secara betul dasar penentuan tersebut, tidak menimbulkan kecurigaan di antara sesama Kepala Desa. Begitu juga empat belas kriteria dari BPPS tersebut perlu disebarluaskan ke masing-masing desa sehingga membuat desa yang bersangkutan tidak merasa curiga atas keputusan data penerima Raskin. Menurut SW tahun ini jumlah rumah tangga yang menerima raskin yang ada di Desa Sanggang menurun sebesar 7%. Lebih lanjut SW menuturkan kalau bisa seperti Pak Zuber ini melakukan kegiatan FGD seperti ini tidak hanya di Desa Baran ini, namun juga melakukannya di desa-desa lainnya (Hasil FGD, 11 Agustus 2012).

### **Model Penanggulangan kemiskinan Berbasis partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian di dua desa yaitu Desa Baran, dan Desa Sanggang, secara umum dapat dibedakan ke dalam dua bentuk dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pertama kegiatan proyek pemerintah. Kedua kegiatan proyek masyarakat.

Untuk kegiatan proyek pemerintah dengan dukungan dana murni dari pemerintah maka tahap perencanaan sering kali masyarakat hanya diberi tahu tentang adanya kegiatan proyek. Pemberitahuan ini disampaikan oleh pimpinan aparat desa dalam fórum rapat atau pertemuan warga desa. Hali ini seperti dikemukakan oleh WD sebagai berikut, “partisipasi masyarakat dalam perencanaan penentuan kegiatan proyek warga desa diberitahu dalam rapat-rapat”.

Berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan penelitian, sejauh ini keterlibatan aktif dalam perencanaan penentuan bentuk kegiatan proyek masih didominasi oleh aparat desa terutama kepala desa. Dengan demikian kepala desa masih sangat menentukan untuk kemajuan dan kemunduran pembangunan desa. Kepala Desa yang kreatif dan inovatif sangat menentukan di dalam keberhasilan pembuatan perencanaan kegiatan proyek yang akan dilaksanakan untuk pembangunan desa.

Kemudian untuk kegiatan pelaksanaan proyek pemerintah untuk kasus di Desa Baran biasanya warga desa setempat tidak ikut dilibatkan. Biasanya ada pihak tersendiri sebagai pelaksana kegiatan proyek. Terutama kegiatan proyek-proyek yang harus melalui pelaksanaan tender. Tender harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ini artinya warga miskin bisa dipastikan tidak dapat mengikuti tender. Karena persyaratan tender hampir tidak mungkin dapat dipenuhi oleh warga miskin. Keterangan mengenai warga miskin pedesaan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan proyek ini seperti dikemukakan oleh NN sebagai berikut, ”Masyarakat miskin tidak ikut terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek biasanya sudah ada sendiri pihak yang mengerjakan proyek bersangkutan.”

Pernyataan hampir sama dikemukakan juga oleh WD sebagai berikut:

”Kegiatan pelaksanaan proyek yang ada di desa biasanya telah ada pihak tersendiri yang mengerjakannya seperti kegiatan proyek rehab sekolah SD.

Namun untuk pelaksanaan kegiatan padat karya seperti pengerasan jalan warga miskin setempat biasanya juga ikut dilibatkan.”

Kemudian pada umumnya pihak pemenang tender sudah memiliki tenaga kerja yang akan mengerjakan pekerjaan kegiatan proyek, seperti kegiatan proyek rehabilitasi gedung sekolah dasar atau lainnya. Dengan demikian warga miskin pedesaan sudah merasa sangat senang jika di antara mereka ada yang ikut terlibat sebagai pekerja. Dengan menjadi tenaga kerja ini berarti pemasukan keuangan bagi yang bersangkutan. Hal ini penting sebagai sumber nafkah untuk menopang hidup sehari-hari bagi warga miskin pedesaan.

Berdasarkan hasil FGD beberapa sumber mengemukakan bahwa untuk kegiatan padat karya masyarakat miskin desa ikut dilibatkan, namun seperti diketahui bersama bahwa kegiatan padat karya ini waktunya hanya sebentar. Setelah kegiatan proyek padat karya selesai maka pekerjaan juga selesai. Keterangan ini seperti dikemukakan oleh HTN Kepala Desa Baran sebagai berikut:

”untuk kegiatan pelaksanaan proyek padat karya seperti proyek PNPM untuk perbaikan jalan masyarakat miskin pedesaan diikutsertakan dalam kegiatan pelaksanaan proyek tersebut. Namun pelaksanaan kegiatan proyek tersebut berjalannya sesuai dengan waktu yang ditentukan dan biasanya relatif pendek. Oleh karena itu persoalan yang penting adalah bagaimana membuat warga miskin pedesaan mempunyai keterampilan untuk mengerjakan sesuatu yang kemudian membuat mereka dapat mendapatkan penghasilan yang relatif tetap setiap harinya.” (Hasil FGD, 11 Agustus 2012).

Kemudian untuk kegiatan evaluasi berdasarkan hasil wawancara di lapangan penelitian dikemukakan bahwa biasanya warga desa tidak ikut terlibat dalam kegiatan evaluasi kegiatan proyek. Evaluasi kegiatan proyek biasanya dilakukan oleh pemerintah sendiri atau oleh pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pernyataan ini seperti dikemukakan oleh WD sebagai berikut:

”Mengenai evaluasi pelaksanaan proyek masyarakat tidak dilibatkan biasanya sudah ada pihak tersendiri yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek” (Hasil wawancara, 8 September 2012)

Pernyataan hampir sama juga dikemukakan oleh NN sebagai berikut:

”Warga tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi atas proyek yang bersangkutan biasanya sudah ada pihak sendiri

yang berasal atau dituntut oleh pemerintah.” (Hasil wawancara, 8 September 2012)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan penelitian menunjukkan bahwa warga desa setempat juga ikut melakukan evaluasi kegiatan proyek. Namun hasil kegiatan evaluasi tidak dilaporkan secara resmi kepada aparat desa. Biasanya kegiatan-kegiatan proyek terutama yang proyek fisik dimana setiap orang dapat melihat hasil kegiatan proyek yang dilakukan. Maka masyarakat desa secara langsung dapat mengamati hasil proyek tersebut. Ini berarti sebetulnya masyarakat juga melakukan evaluasi pengamatan di dalam setiap hasil kegiatan proyek. Namun hasil evaluasi pengamatan masyarakat desa setempat barangkali belum memberikan hasil yang signifikan sebagai masukan pelaksanaan kegiatan proyek, lebih-lebih sebagai masukan untuk perbaikan kegiatan proyek di mana yang akan datang.

Realitas di atas agak sedikit berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa Sanggang. Di Desa Sanggang perencanaan pelaksanaan kegiatan proyek terutama PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) pertama kali Kepala Desa melalui rapat desa mengumumkan tentang kegiatan PNPM yang akan berjalan di Desanya, terutama dalam kasus ini untuk talutisasi dan pengerasan jalan. Ini berarti memang tahap perencanaan pihak aparat desa masih dominan dalam menentukan perencanaan pelaksanaan kegiatan proyek.

Namun dari sisi perencanaan pelaksanaan proyek Kepala Desa menawarkan kepada pihak warga desa untuk dilaksanakan sendiri atau dikerjakan oleh pemborong. Kalau kegiatan proyek dikerjakan sendiri maka keuntungannya akan lebih banyak. Artinya jumlah volume hasil kegiatan proyek akan lebih besar dibandingkan dengan dikerjakan oleh pemborong atau orang lain.

Berdasarkan kasus yang ada di Desa Sanggang sering kali kegiatan proyek dikerjakan sendiri oleh warga desa. Hal ini seperti dikemukakan oleh SW selaku Kepala Desa bahwa setelah disampaikan kepada warga desa mengenai pelaksanaan kegiatan proyek apakah akan dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh pemborong. Kemudian warga desa Sanggang lebih memilih untuk mengerjakan sendiri dengan memperhatikan hasil yang akan didapatkan (Hasil wawancara, Agustus 2012).

Bahkan menurut pengakuan Kepala Desa Sanggang dengan cara pelaksanaan kegiatan proyek seperti itu maka sekarang ini hampir 90% jalan yang ada di Desa Sanggang sudah dikeraskan dengan sistem betonisasi (Hasil wawancara, Agustus 2012).

Sedangkan dalam tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek biasanya masyarakat miskin pedesaan tidak ikut terlibat. Paling tidak hal ini dikemukakan oleh NN bahwa tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek masyarakat tidak ikut dilibatkan (Hasil angket, Agustus 2012).

Barangkali bahwa tahap evaluasi masih merupakan sesuatu yang tidak lazim untuk dilakukan oleh masyarakat miskin. Di era yang menekankan pada paradigma *top down* dimana kebijakan-kebijakan penting selalu didominasi oleh atasan (pemerintah), maka suara masyarakat bawah dipandang tidak penting untuk mempengaruhi jalannya keputusan penting pemerintah.

Dewasa ini setelah memasuki era desentralisasi dimana pendekatan *top down* juga diimbangi oleh paradigma *bottom up*, yaitu pendekatan yang juga memperhatikan suara masyarakat bawah. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek masih kurang bisa berjalan secara baik.

Oleh karena itu dipandang perlu kiranya memberikan penguatan kepada masyarakat miskin untuk dapat melakukan evaluasi setiap kegiatan proyek pemerintah. Karena kegiatan evaluasi ini penting untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin sebagai penerima manfaat dari kegiatan proyek bersangkutan.

Bentuk kedua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berkaitan dengan kegiatan proyek masyarakat. Dalam hal ini kegiatan proyek masyarakat seperti membangun rumah, membangun jalan secara swadaya ada sedikit perbedaan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Untuk membangun rumah yang melibatkan sambatan warga sekitar, pemilik rumah yang menentukan perencanaan berkaitan dengan bentuk rumah, material yang akan digunakan untuk membangun rumah, dan juga hari yang akan digunakan untuk memulai membangun rumah.



Kemudian tahap pelaksanaan pembangunan rumah pemilik rumah melibatkan warga sekitar. Pelibatan ini dikenal dengan istilah sambatan. Dengan konsep sambatan membangun rumah, pemilik rumah tidak memberikan uang upah kepada buruh bangunan di dalam mendirikan rumah. Pemilik rumah hanya menyediakan makanan dan minuman. Fenomena ini terjadi baik di Desa Baran, maupun di Desa Sanggang. Dengan adanya konsep sambatan membangun rumah ini pemilik rumah sangat diuntungkan dari sisi pengeluaran biaya. Namun pemilik rumah juga akan memberikan tenaga juga ketika tetangga membutuhkan di dalam membangun rumah.

Keterangan tersebut seperti disampaikan oleh NN sebagai berikut:

Masyarakat miskin biasanya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan seperti membetulkan jalan desa, membetulkan saluran air yang ada di desa, membetulkan rumah warga, bersih-bersih lingkungan seminggu sekali.” (Hasil wawancara 8 September 2012).

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh SYN sebagai berikut:

“Kegiatan-kegiatan masyarakat yang melibatkan masyarakat miskin pedesaan antara lain pembuatan jalan rabat beton, pembuatan gedung posyandu, pembuatan gedung TK dan PAUD. Sebagaimana dari kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut didukung oleh dana dari pemerintah seperti Dana PNPM, dan juga APBD propinsi.” (Hasil angket 11 Agustus 2012).

Kemudian untuk tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek membangun rumah pemilik rumah melakukan sepenuhnya atas bentuk dan keberhasilan pembangunan rumah. Di samping para tukang juga ikut memperhatikan dan juga menilai atas keberhasilan di dalam pembangunan rumah bersangkutan. Apakah rumah sudah sesuai dengan yang diinginkan sang pemilik rumah atau apakah masih ada yang perlu ditambahkan dari sisi bentuk dan lainnya.

Kemudian agak berbeda ketika kegiatan proyek berkaitan dengan pembangunan jalan secara mandiri. Untuk kegiatan ini perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan proyek pembangunan jalan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu komunitas bersangkutan. Biasanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan proyek pembangunan jalan dipimpin oleh Ketua Rukun Tetangga yang bersangkutan. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan jalan dengan cara melalui rapat-rapat yang diselenggarakan secara berurutan bertempat di anggota rukun tetangga.

### Model Penanggulangan kemiskinan dengan Pendekatan Paul Shaffer

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 23 responden dari Desa Baran dan Desa Sanggang dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 5.1. Model Penanggulangan kemiskinan dengan Pendekatan Paul Shaffer (N: 22, NA: 1)**

No	Aspek modal	SS	S	TTP	TS	STS
1	Pendidikan Minimal SMA	45%	40%	4%	4%	0%
2	Tingkat Kesehatan dan gizi	36%	40%	0%	13%	0%
3	Keterlibatan dalam organisasi sosial	13%	72%	0%	4%	0%
4	Kepemilikan tanah dan benda berharga lainnya, pekerjaan tetap	36%	54%	0%	4%	0%
5	Keterlibatan dalam organisasi politik	0%	13%	36%	32%	9%
6	Kepemilikan sumber kekerasan	0%	13.5%	9%	54.5%	18%
7	Kualitas sumber daya alam, dan keahlian dalam mengolah sumber daya alam	18%	63%	13%	0%	0%
Jumlah		-	-	-	-	-

Sumber: Pengolahan data Primer Penelitian, Agustus 2012

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- TTP : Tidak Tahu Pasti
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Tabel 5.1. menjelaskan bahwa untuk pendidikan minimal SMA dalam kaitannya untuk dapat mengendalikan kemiskinan terdapat 45% sangat setuju, 40% setuju, 4% tidak tahu pasti, 4% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

Ini berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju kalau pendidikan minimal SMA dipandang penting untuk dapat mengendalikan tingkat kemiskinan.

Pendapat yang mengungkapkan bahwa ia sangat setuju apabila pendidikan minimal SMA sebagai sarat penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan antara lain dikemukakan oleh WGY. Menurut WGY :

”Pendidikan minimal SMA sangat penting untuk dapat mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan, karena untuk minimal pendidikan SMA dapat membuat orang yang bersangkutan sudah bisa berpikir secara lebih luas (Hasil angket, 7 Agustus 2012).

Bagi mereka yang tidak setuju bahwa tingkat pendidikan minimal SMA sebagai faktor penting untuk dapat mengendalikan kemiskinan antara lain mengatakan bahwa orang-orang yang berhasil dalam hidup tidak harus punya pendidikan cukup tinggi atau SMA. Keberhasilan hidup lebih banyak ditentukan oleh pengalaman dari masing-masing orang. Tanggapan seperti ini antara lain dikemukakan oleh WD. Menurut WD :

”Orang-orang yang berhasil di dalam meniti usaha tidak harus lulusan SMA. Namun banyak di antara mereka yang berhasil tidak mempunyai pendidikan hingga lulus SMA” (Hasil wawancara, 8 September 2012).

Untuk tingkat kesehatan dan gizi diperoleh hasil bahwa 36% menyatakan sangat setuju, 40% setuju, 0% tidak tahu pasti, 13% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Ini berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju apabila tingkat kesehatan dan gizi sebagai faktor penting untuk dapat mengendalikan kemiskinan. Bagi sebagian besar ini berpendapat bahwa terutama kesehatan dan juga gizi ikut berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Bagaimana kalau seseorang itu sakit-sakitan, maka ia dapat dipastikan tidak dapat bekerja dengan baik. Karena ia tidak dapat bekerja dengan baik maka ia tidak akan dapat memperoleh penghasilan secara baik pula.

Pendapat sangat setuju apabila tingkat kesehatan dan gizi sebagai faktor penting untuk dapat mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan antara lain disampaikan oleh HTN. Menurut HTN :

”Badan sehat, gizi cukup akan memicu pola berpikir lebih ke arah perubahan” (Hasil angket, 7 Agustus 2012).

Kemudian pendapat sangat setuju apabila tingkat kesehatan dan gizi sebagai faktor penting untuk dapat mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan disampaikan juga oleh DLY. Menurut DLY :

”Badan sehat dan gizi cukup akan dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan. Sedangkan tingkat kecerdasan akan dapat mempengaruhi di dalam pengendalian kemiskinan bagi orang yang bersangkutan” (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Kemudian menurut RMUT tingkat kesehatan dan gizi makanan pada keluarga miskin mempunyai pengaruh sangat penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan karena dengan tingkat kesehatan dan

makanan bergizi dalam jumlah yang memadai dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berkerja (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Kemudian bagi mereka yang tidak setuju bahwa tingkat kesehatan dan gizi ikut berperan dalam mengendalikan kemiskinan sebanyak 13%. Jumlah ini cukup besar. Mereka berpendapat bahwa selama ini tingkat kesehatan mereka bukan sebagai masalah penting dalam penurunan angka kemiskinan. Namun persoalan lain seperti uang, atau modal usaha yang senantiasa menjadi persoalan penting dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan yang mereka hadapi.

Bagi mereka yang tidak setuju bahwa tingkat kesehatan dan gizi ikut berperan dalam mengendalikan kemiskinan antara lain mengemukakan bahwa masyarakat miskin pedesaan hanya persoalan kesehatan dan pangan yang mereka miliki. Namun mereka tidak dapat memenuhi secara baik bentuk kebutuhan yang lain seperti sandang dan perumahan. Pernyataan ini dikemukakan oleh TM sebagai berikut:

“Saya tidak setuju kalau tingkat kesehatan dan gizi makanan pada keluarga miskin itu dapat menanggulangi kemiskinan di masyarakat pedesaan karena masyarakat pedesaan dalam hal kesehatan dan pangan hanya yang tersedia. Namun kebutuhan lain seperti pangan, sandang, pendidikan, kurang memadai” (Hasil angket, 9 Agustus 2012).

Kemudian WD yang juga tidak setuju mengatakan bahwa untuk kesehatan dan gizi makan tidak terlalu menjadi masalah karena alhamdulillah dia sering sehat dan hanya kadang pusing karena kecapean (Hasil wawancara, 8 September 2012).

Untuk keterlibatan dalam organisasi sosial diperoleh hasil bahwa 13% menyatakan sangat setuju, 72% setuju, 0% tidak tahu pasti, 4% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Ini berarti sebagian besar responden (72%) menyatakan setuju bahwa keterlibatan dalam organisasi sosial dipandang mampu untuk dapat mengendalikan kemiskinan. Bagi mereka yang setuju menyatakan bahwa keikutsertaan dalam organisasi sosial akan dapat memberikan pengalaman dan jaringan hubungan sosial, sehingga kemudian dapat mengendalikan kemiskinan.

Berikut adalah beberapa pernyataan dari responden yang menyatakan sangat setuju. WY menyatakan sangat setuju apabila keikutsertaan dalam organisasi sosial dapat mengendalikan kemiskinan keluarga karena dengan ikut

serta dalam kegiatan organisasi sosial dapat diperoleh pengalaman dan motivasi untuk keluar dari persoalan kemiskinan (Hasil angket, 9 Agustus 2012).

Kemudian ungkapan sangat setuju juga dikemukakan oleh HTN. Menurut HTN:

”Dengan keterlibatan warga miskin dalam organisasi sosial maka warga miskin menjadi cenderung tidak rendah diri. Dan hal tersebut sangat penting untuk mengendalikan kemiskinan yang mereka hadapi” (Hasil angket, 7 Agustus 2012).

Jawaban hampir sama juga dikemukakan oleh NN. Menurut NN :

”Saya sangat setuju apabila keterlibatan dalam organisasi sosial warga masyarakat miskin pedesaan akan dapat mengendalikan kemiskinan yang mereka hadapi, sebab dengan ikut terlibat dalam organisasi sosial tersebut mereka dapat mengajukan usul tentang keluhan kesah yang dihadapi keluarga miskin (Hasil wawancara, 8 September 2012).

Kemudian hanya 4% responden menyatakan bahwa keikutsertaan dalam organisasi sosial dipandang tidak penting dalam mengendalikan kemiskinan. Hal ini anatra lain dikemukakan oleh WD, dan juga PNK. Mereka berpendapat bahwa organisasi sosial tidak mampu untuk memberikan kontribusi di dalam menurunkan masalah kemiskinan yang mereka hadapi (Hasil wawancara, 8 September 2012).

Kemudian untuk kepemilikan tanah dan benda berharga lainnya, dan pekerjaan tetap dalam kaitannya sebagai faktor penting untuk mengendalikan kemiskinan diperoleh hasil sebagai berikut: 36% menyatakan sangat setuju, 54% menyatakan setuju, 0% menyatakan tidak tahu pasti, 4% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Hal tersebut di atas berarti bahwa sebagian besar responden (54%) menyatakan setuju apabila keberadaan kepemilikan tanah dan benda lainnya, serta pekerjaan tetap sebagai faktor penting untuk mengendalikan kemiskinan. Lebih-lebih di masyarakat pedesaan tanah masih merupakan aset yang sangat berharga untuk pengembangan usaha sebagai usaha untuk lepas dari permasalahan kemiskinan.

Yang menyatakan sangat setuju antara lain disampaikan oleh SZT. Menurut SZT:

”Apabila keluarga miskin mempunyai kepemilikan tanah yang cukup, pekerjaan tetap, dan kepemilikan benda berharga, maka secara otomatis keluarga miskin bersangkutan mempunyai penghasilan di atas cukup” (Hasil angket, 9 Agustus 2012).

Pendapat SZT sama dengan pendapat WGY dimana WGY berpendapat sebagai berikut:

”Kepemilikan tanah yang cukup, pekerjaan tetap, dan kepemilikan benda berharga pada keluarga miskin maka sudah jelas akan membawa masyarakat yang bersangkutan tidak miskin” (Hasil angket, 7 Agustus 2012).

Yang menyatakan setuju antara lain disampaikan oleh LSN. Menurut LSN:

”Setuju bahwa kepemilikan tanah yang cukup, pekerjaan tetap, dan kepemilikan benda berharga pada keluarga miskin itu sangat penting untuk keluar dari permasalahan kemiskinan karena seperti dengan kepemilikan pekerjaan tetap maka dapat menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari” (Hasil angket, 9 Agustus 2012).

Kemudian menurut NN setuju bahwa kepemilikan tanah yang cukup, pekerjaan tetap, dan kepemilikan benda berharga pada keluarga miskin itu sangat penting untuk keluar dari permasalahan kemiskinan karena kepemilikan tanah yang cukup, pekerjaan tetap, dan kepemilikan benda berharga pada keluarga miskin itu sangat penting untuk bertahan hidup dan untuk modal hidup.” (Hasil wawancara, 8 September 2012).

Kemudian DLY setuju karena kepemilikan tanah yang cukup, pekerjaan tetap, dan kepemilikan benda berharga pada keluarga miskin itu sangat penting untuk modal usaha atau sebagai agunan untuk mencari modal usaha (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Kemudian hanya 4% responden yang menyatakan tidak setuju apabila keberadaan kepemilikan tanah, pekerjaan tetap, dan benda berharga lainnya sebagai faktor penting untuk mengendalikan kemiskinan.

Pendapat tidak setuju ini seperti disampaikan oleh EM (Hasil angket, 5 Agustus 2012). Menurut EM keberadaan kepemilikan tanah, pekerjaan tetap, dan benda berharga lainnya tidak setuju sebagai faktor penting untuk mengendalikan

kemiskinan. Meskipun EM tidak setuju namun EM tidak memberikan keterangan mengapa ia tidak setuju.

Kemudian untuk keterlibatan dalam organisasi politik diperoleh hasil sebagai berikut: 0% menyatakan sangat setuju, 13% menyatakan setuju, 36% menyatakan tidak tahu pasti, 32% menyatakan tidak setuju, dan 9% menyatakan sangat tidak setuju.

Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden (36%) menyatakan tidak tahu pasti kalau keterlibatan dalam organisasi politik dapat digunakan untuk mengendalikan kemiskinan. Kemudian disusul sebesar 32% menyatakan tidak setuju. Ini berarti bahwa masyarakat miskin pedesaan tidak bisa memberikan penilaian yang sangat berharga atas keterlibatan mereka dalam organisasi politik. Lebih-lebih masyarakat miskin pedesaan tidak mempunyai cukup waktu untuk memikirkan dan ikut terlibat aktif dalam organisasi politik. Dengan demikian wajar jika sebagian besar mereka menyatakan tidak tahu pasti atau bahkan tidak setuju. Tanggapan ketidaksetujuan keterlibatan dalam organisasi politik sebagai pengendalian kemiskinan antara lain dikemukakan oleh WD maupun PNK (Hasil wawancara, 8 September 2012).

Pendapat yang menyatakan tidak tahu pasti seperti diberikan oleh SN. Menurut SN:

Keterlibatan aktif keluarga miskin pedesaan dalam kegiatan organisasi politik ada yang dapat membantu untuk keluar dari permasalahan kemiskinan, namun juga ada yang tidak dapat membantu untuk keluar dari permasalahan kemiskinan (Hasil angket, 11 Agustus 2012).

Kemudian juga pendapat yang tidak tahu pasti seperti dikemukakan oleh SW. Menurut SW sebagai berikut:

”Bila masyarakat miskin hanya mengenal organisasi politik dan tidak mau bekerja maka sama saja tidak akan berhasil untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapi. Sehingga keterlibatan keluarga miskin dalam organisasi politik dipandang tidak mampu untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi” (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Kemudian bagi mereka yang tidak setuju menyampaikan bahwa keterlibatan dalam organisasi politik tidak akan melepaskan permasalahan kemiskinan. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh WGY, NN, dan juga HTN (Hasil angket, Agustus 2012).

Kemudian pendapat yang sangat tidak setuju ikut terlibat dalam organisasi politik dapat mengendalikan kemiskinan antara lain dikemukakan oleh SZT. Menurut SZT yang penting bekerja untuk dapat mendapatkan uang. Keterlibatan dalam organisasi politik justru malah membuang waktu yang seharusnya untuk bekerja untuk mencari uang (Hasil angket, 9 Agustus 2012).

Kemudian untuk kepemilikan sumber kekerasan sebagai faktor untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan diperoleh hasil 0% menyatakan sangat setuju, 13.5% menyatakan setuju, 9% menyatakan tidak tahu pasti, 54.5% menyatakan tidak setuju, dan 18% menyatakan sangat tidak setuju.

Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden (54.5%) menyatakan tidak setuju. Kemudian disusul 18% responden menyatakan sangat tidak setuju. Masyarakat miskin pedesaan cenderung memberikan penilaian negatif atas sumber-sumber kekerasan sebagai usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Bagi yang tidak setuju bahwa kepemilikan sumber kekerasan sebagai faktor untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan antara lain dikemukakan oleh MGN. Menurut MGN sumber kekerasan tidak akan membuat orang miskin menjadi lebih baik (Hasil angket, 9 Agustus 2012). Kemudian RMYT mengatakan dengan kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan (Hasil angket, 8 Agustus, 2012). SW menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu contoh yang tidak baik bila diterapkan pada masyarakat miskin yang umumnya cinta damai (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Kemudian SMD menyatakan:

”Kekerasan tidak mempunyai hati nurani. Kekerasan tidak mempunyai rasa sosial atau dengan kata lain rasa sosial tidak ada dalam kekerasan, dan tidak bisa menyelesaikan masalah” (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Kemudian DLY menyatakan bahwa sumber kekerasan akan membuat masyarakat miskin akan merasa takut (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Usaha mengendalikan kemiskinan dengan menggunakan sumber-sumber kekerasan justru akan menimbulkan masalah baru. Hal ini akan semakin memperumit permasalahan yang sudah ada. Pendapat seperti ini antara lain dikemukakan oleh WG (Hasil angket, 7 Agustus 2012). SY menyatakan sumber kekerasan justru menimbulkan retaknya rumah tangga (Hasil angket, 11 Agustus 2012). Kemudian NN menyatakan tidak setuju kalau sumber kekerasan sebagai



usaha untuk mengendalikan kemiskinan. Lebih setuju kalau dilakukan dengan cara musyawarah. Sebab musyawarah dipandang lebih memberikan jalan kedamaian.

Kemudian untuk kepemilikan sumber daya alam, dan keahlian dalam mengolah sumber daya alam diperoleh hasil 18% menyatakan sangat setuju, 63% menyatakan setuju, 13% menyatakan tidak tahu pasti, 0% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden (63%) menyatakan setuju apabila kepemilikan sumber daya alam, dan keahlian dalam mengolah sumber daya alam sebagai faktor penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan.

Pendapat yang menyatakan setuju bahwa kepemilikan sumber daya alam, dan keahlian dalam mengolah sumber daya alam sebagai faktor penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan antara lain dikemukakan oleh SMD. Menurut SMD sebagai berikut:

”Kepemilikan sumber daya alam dan keahlian untuk mengolah sumber daya alam penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan. Cuma permasalahannya belum ada kemampuan dan keahlian untuk mengelola sendiri. Hal ini berarti perlu bantuan dari pihak-pihak terkait” (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Kemudian JS menyatakan sebagai berikut:

”Setuju bahwa sumber daya alam dan keahlian untuk mengolah sumber daya alam penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan. Adanya sumber daya alam yang berkualitas tanpa ditunjang sumber daya manusia yang memadai tidak akan keluar dari kemiskinan. Untuk itu perlu SDM yang tinggi sehingga bisa mengolah sendiri sumber daya alam untuk meningkatkan ekonomi sehingga bisa keluar dari kemiskinan” (Hasil angket, 7 Agustus 2012).

Kemudian SZT menyatakan sebagai berikut:

”Setuju Setuju bahwa sumber daya alam dan keahlian untuk mengolah sumber daya alam penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan. Dengan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki akan merubah sikap dan pola pikir penduduk miskin” (Hasil angket, 10 Agustus 2012).

Kemudian SW menyatakan sebagai berikut:

”Setuju Setuju bahwa sumber daya alam dan keahlian untuk mengolah sumber daya alam penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat

pedesaan. Dengan keahlian masyarakat miskin bisa memanfaatkan keahlian tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan baru” (Hasil angket, 8 Agustus 2012).

Hal ini sesuai dengan kasus yang ada di Desa Sanggang bahwa sumber daya alam merupakan permasalahan yang vital untuk dapat keluar dari permasalahan kemiskinan. Di Desa Sanggang yang merupakan lahan dataran tinggi, kesulitan mencari air menjadikan lahan Desa Sanggang tidak cocok untuk tanaman padi. Dimana tanaman padi sebagai makanan pokok masyarakat.

Kemudian untuk kasus di Desa Baran meskipun tanah pertanian cukup bagus, persediaan air juga cukup bagus, karena Desa Baran merupakan pintu masuk pertama dialirkannya air dari Waduk Colo. Persoalan yang telak di Desa Baran adalah seringnya gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tanaman padi seperti tikus ataupun keong emas.

Oleh karena itu yang menjadi permasalahan penting berkaitan dengan kualitas sumber daya alam dan keahlian dalam mengolah sumber daya alam adalah bagaimana masyarakat miskin pedesaan dapat meningkatkan kualitas lahan yang ada melalui pengolahan lahan secara baik, dan meningkatkan keahlian manusianya melalui peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dalam mengolah tanah yang ada.

Kasus-kasus di Thailan yang sangat terkenal dengan penghasilan alam pertaniannya patut dicontoh dan diberdayakan untuk kasus di masyarakat pedesaan Indonesia.

Memang ada permasalahan tersendiri baik di masyarakat pedesaan Sanggang ataupun Baran di mana cukup besar warganya mempunyai kebiasaan merantau ke kota-kota besar di Indonesia. Kasus semacam ini dapat berarti bahwa masyarakat pedesaan Sanggang, ataupun Baran bisa mengalami kekurangan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan untuk membangun desa, terutama pembangunan di sektor pertanian.

Padahal di satu sisi masyarakat pedesaan membutuhkan tenaga yang profesional untuk dapat menciptakan bibit-bibit unggul baik di bidang padi, dan buah-buahan yang sangat penting untuk menyokong pendapatan masyarakat pedesaan. Keberhasilan dunia usaha pertanian baik padi dan buah-buahan akan

sangat memungkinkan masyarakat miskin pedesaan akan dapat keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat pedesaan dipandang sebagai keadaan yang dialami oleh seorang atau sekelompok orang karena ketiadaan pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga menyebabkan seorang atau sekelompok orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, pakaian dan perumahan secara layak.
2. Kemiskinan masyarakat pedesaan Sanggang terutama dipicu oleh keadaan tanah Sanggang yang tidak baik untuk tanaman pangan padi karena Sanggang merupakan dataran tinggi. Sedangkan kemiskinan masyarakat pedesaan Baran terutama dipicu oleh seringnya hama pertanian padi yang menyerang tanaman pertanian.
3. Dalam penentuan rumah tangga atau keluarga miskin yang akan mendapatkan subsidi BLT (Bantuan Langsung Tunai), ataupun Raskin (Beras untuk Masyarakat Miskin) Kabupaten Sukoharjo menggunakan penentuan yang diberikan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). Penentuan BPS ini berdasarkan pada 14 kriteria. Kemudian penentuan BPS ini tidak dapat dicampuri oleh departemen manapun.
4. Model penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat yang menyangkut tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk kegiatan proyek pemerintah masyarakat miskin pedesaan masih cenderung bersifat pasif. Hal ini ditunjukkan bahwa untuk tahap perencanaan masih dominan dilakukan oleh aparat pemerintah, dalam hal ini di tingkat paling rendah adalah kelurahan, sedangkan masyarakat miskin pedesaan sifatnya hanya diberitahu melalui forum pertemuan desa. Kemudian untuk tahap pelaksanaan dan evaluasi biasanya sudah ada pihak tersendiri yang melakukannya. Walaupun masyarakat miskin pedesaan melakukan tahap evaluasi sebagai

bentuk melihat dan memperhatikan hasil kegiatan proyek yang ada, namun evaluasi yang dilakukannya tidak memberikan arti yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan kegiatan proyek.

5. Berkaitan dengan model penanggulangan kemiskinan Paul Shaffer (2008) diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju kalau pendidikan minimal SMA dipandang penting untuk dapat mengendalikan tingkat kemiskinan. Kemudian sebagian besar responden menyatakan setuju apabila tingkat kesehatan gizi sebagai faktor penting untuk dapat mengendalikan kemiskinan. Kemudian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa keterlibatan dalam organisasi sosial dipandang mampu untuk dapat mengendalikan kemiskinan. Kemudian sebagian besar responden menyatakan setuju apabila keberadaan kepemilikan tanah dan benda lainnya, serta pekerjaan tetap sebagai faktor penting untuk mengendalikan kemiskinan. Kemudian sebagian besar responden menyatakan tidak tahu pasti, dan mereka cenderung untuk menyatakan tidak setuju kalau organisasi politik merupakan aset yang penting untuk mengendalikan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemudian sebagian besar responden menyatakan tidak setuju apabila kepemilikan sumber kekerasan sebagai faktor untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan. Kemudian sebagian besar responden menyatakan setuju apabila kepemilikan sumber daya alam, dan keahlian dalam mengolah sumber daya alam sebagai faktor penting untuk mengendalikan kemiskinan di masyarakat pedesaan.

#### Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat disarankan untuk masyarakat miskin pedesaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai berikut:

1. Masyarakat miskin pedesaan perlu memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk dapat keluar dari permasalahan kemiskinan.
2. Masyarakat miskin pedesaan Sanggang perlu mempunyai jenis pekerjaan di luar sektor pertanian seperti sektor pengelasan, transportasi, perdagangan dan lainnya. Kalaupun masyarakat pedesaan Sanggang masih ingin sekali mempunyai pekerjaan dan penghasilan di sektor pertanian, maka pilihan yang

cukup baik adalah dengan cara mengembangkan sektor pertanian untuk tanaman hortikultura ataupun perkebunan kayu jati. Kemudian untuk masyarakat pedesaan Baran perlu mencari pengetahuan dan keterampilan di dalam membasmi hama tanaman. Namun masyarakat pedesaan Baran perlu juga mengembangkan tanaman hortikultura untuk peningkatan pendapatan rumah tangga.

3. Baik masyarakat pedesaan Sanggang ataupun Baran seyogyanya menerima dengan baik hasil keputusan penentuan jumlah rumah tangga atau keluarga miskin yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah telah berusaha sebijaksana mungkin di dalam menentukan jumlah rumah tangga atau keluarga miskin ini.
4. Pemerintah perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin pedesaan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan proyek. Ini sangat penting bagi masyarakat miskin pedesaan untuk dapat keluar dari permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi.
5. Masyarakat miskin pedesaan masih perlu melihat secara seksama pada pendekatan modal kekerasan dan modal politik untuk dapat keluar dari permasalahan kemiskinan. Sejauh kedua modal tersebut tidak melahirkan permasalahan yang lebih rumit, seperti sedikit memaksa anggota keluarga atau anak untuk melakukan sesuatu kebaikan untuk dapat keluar dari permasalahan kemiskinan.

### **Daftar Pustaka**

- Arraiyah, Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2007.
- Centre Tricontinental. *Comment se Construit la Pauvreté*. Paris: l'Harmattan, 2000.
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*, Penerjemah Pepep Sudrajat. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1987.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sociology*, Sixth Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co, 1984.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Perjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendamping Mulyarto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia ( UI Press), 1992.

Oakley, Peter, and David Marsden. *Approaches to Participation in Rural Development*, Geneva, Switzerland: International Labour Office, 1984.

Quibria, M.G. *Rural Poverty in Asia: Priority Issues and Policy Option*. Hongkong: Oxford University Press, 1993.

Sen, Amartya dan Jame Foster. *On Economic Inequality*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Shaffer, Paul. 2008. *New Thinking on Poverty: Implications for Globalisation and Poverty Reduction Strategies*. University of Toronto, Canada, RER, ISSUE no. 47.

**Website:**

<http://en.wikipedia.org/wiki/poverty>

<http://www.dinsos.pemda-diy.go.id/index.php>

**Surat kabar**

Solopos, Senin, 14 Juli 2008, Tahun XI/No. 286/Juli/2008.

**Dokumen**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2007, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, 2007).

Rencana Induk Penelitian Unggulan Universitas Sebelas Maret Tahun 2012 – 2025.

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470.05/590/2007, tanggal 29 Desember 2007.